

## IMPLEMENTASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN NASABAH USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA JAYAPURA (STUDI KASUS BANK PAPUA JAYAPURA)

Tri Listyo Hernaningsih<sup>1</sup>  
Ida Ayu Purba Riani<sup>2</sup>  
*purbariani@feb.uncen.ac.id*  
Transna Putra Urip<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan: a) menganalisa persepsi debitur terhadap implementasi KUR, b) menganalisa implementasi KUR terhadap pendapatan nasabah UMKM sebelum dan sesudah menerima KUR sektor usaha jasa dan sektor usaha perdagangan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dipergunakan data primer dan data sekunder dengan runtun waktu dari tahun 2014 – 2016 yang dianalisis dengan menggunakan uji mean, uji standart deviasi, uji korelasi dan uji t hitung. Hasil penelitian ini mewujudkan bahwa persepsi nasabah terhadap implementasi KUR sudah efektif dengan total skor penilaian 1585 dari 1785 berarti sudah tercapai tujuan Bank Papua guna membantu UMKM. Dari hasil korelasi menunjukkan bahwa penyaluran KUR berpengaruh terhadap pendapatan nasabah sebelum dan sesudah menerima KUR, sektor usaha jasa diperoleh nilai t-hitung  $-6.087 > t\text{-tabel } 0,5$  persen dan nilai p sebesar  $0,000 (0.000 < 0,05)$  yang berarti ada perubahan peningkatan pendapatan nasabah signifikan, sektor usaha perdagangan diperoleh nilai t-hitung  $-10322 > t\text{-tabel } 0,5$  persen dan nilai p sebesar  $0,000 (0,0000 < 0,005)$  yang berarti ada perubahan peningkatan pendapatan nasabah signifikan.

**Kata kunci : UMKM, KUR, Sektor Usaha Jasa, Sektor Usaha Perdagangan, Pendapatan**

### PENDAHULUAN

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas dalam mendukung kebijakan pemberian kredit/ pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. KUR lahir sebagai respon dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Pada tahun 2015, ” *Tercapainya Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sebesar Rp. 20 triliun* ” menjadi salah satu target Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. Target tersebut terpenuhi dengan jumlah penyaluran sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 22,75 triliun (113,75%). Jumlah tersebut dicapai dalam kurun waktu empat bulan penyaluran KUR oleh 3 Bank BUMN (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI).

Capaian output yang melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2015 dapat dikategorikan sebagai pencapaian yang sangat baik. Capaian ini merupakan hasil koordinasi dan sinergitas yang baik dengan para pemangku kepentingan KUR yang tergabung dalam Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta dengan bank pelaksana, perusahaan penjamin, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dibawah koordinasi dan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Output yang dihasilkan membawa hasil yang positif khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Sesuai dengan laporan penyaluran KUR, jumlah debitur yang menerima KUR pada tahun 2015 mencapai 1.003.553 juta UMKM.

---

<sup>1</sup> Alumni Magister Ilmu Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

Manfaat program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM. Total penyaluran KUR tahun 2007-2014 sebesar Rp. 178,85 triliun dengan NPL sebesar 3,3%. Tenaga kerja yang berhasil diserap dari program KUR adalah sebanyak 20.344.639. Hasil workshop evaluasi KUR dan Rakor Komite Kebijakan KUR pada tanggal 15 Desember 2014, KUR tetap dilanjutkan dengan penguatan regulasi dan perbaikan skemanya.

Hasil evaluasi melalui kajian oleh pihak terkait KUR menjadi salah satu dasar dalam upaya perbaikan program KUR antara lain dengan meningkatkan penyalurannya kepada sektor prioritas seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan industri pengolahan serta kepada usaha mikro dan kecil agar mempunyai efek yang lebih besar kepada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa perbaikan regulasi untuk pelaksanaan KUR tahun 2015 yaitu:

1. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditetapkan pada 15 Juli 2015.
2. Peraturan Menko Perekonomian No. 6 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Lamp I, KUR Mikro, Lamp II, KUR Ritel dan Lamp III, KUR Penempatan TKI) diundangkan tanggal 7 Agustus 2015.
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 30 Juli 2015.
4. Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015, meliputi: PT. BRI, PT. Bank Mandiri, PT. BNI, Perum Jamkrindo, dan PT. Askrindo.

Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan relaksasi kebijakan terkait KUR khususnya pada sektor penyaluran, kriteria penerima KUR, dan jenis penyaluran KUR, beberapa Regulasi terkait Relaksasi KUR antara lain:

1. Permenko 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang memuat beberapa relaksasi kebijakan yaitu: penambahan sektor yang dibiayai; perluasan penerima KUR; penambahan jangka waktu, dan restrukturisasi KUR Mikro dan KUR Ritel.
2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR.
3. Penguatan basis data SIKP dengan dukungan Kementrian teknis, Pemda dan TNP2K.

Dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No. 188 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kepmenko 170 Tahun 2015, telah ditetapkan penambahan Bank Pelaksana KUR: KUR Penempatan TKI (Bank Sinarmas, BII Maybank); KUR Mikro dan KUR Ritel (BPD Kalimantan Barat, BPD Nusa Tenggara Timur) dengan evaluasi dan pengawasan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Papua mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian daerah yaitu sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan melalui pemberian hasil laba perusahaan daerah. Selain itu adalah sebagai salah satu penggerak perekonomian sektor swasta di Papua melalui fungsinya sebagai lembaga keuangan, bank yang menghimpun dana masyarakat melalui simpanan (tabungan, giro, deposito) dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Berikut data tentang jumlah nasabah dan jumlah KUR Bank Papua tahun 2014 – 2017.

**Tabel 1.**  
**Jumlah Nasabah dan Jumlah Kredit Bank Papua**  
**Tahun 2014 – 2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kredit</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>
--------------	----------------------	-----------------------

2014	13.359.000.000	339
2015	13.207.000.000	314
2016	14.209.000.000	352
2017	15.000.000.000	373

Sumber : Bank Papua, 2018

Meskipun demikian terdapat juga calon nasabah yang tidak disetujui dalam pengambilan KUR. Berikut data tentang calon nasabah yang tidak disetujui.

**Tabel 2.**  
**Data Calon Nasabah KUR Bank Papua**

Tahun	Calon Nasabah	Approve	Non Approve
2014	395	339	56
2015	374	314	60
2016	403	352	51
2017	459	373	86

Sumber: Bank Papua 2018

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan penelitian tentang peran kredit Bank Papua dengan judul “Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Guna Meningkatkan Pendapatan Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Jayapura” (Studi Kasus Bank Papua Jayapura). Adapun Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa persepsi debitur KUR terhadap implementasi KUR.
2. Menganalisa implementasi KUR terhadap pendapatan nasabah UMKM sebelum dan sesudah menerima KUR sektor usaha jasa dan sektor usaha perdagangan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Bank

Menurut Sumary, memberikan pengertian bank sebagai berikut: “Bank adalah badan yang aktif memberikan kredit kepada nasabah, baik dalam bentuk kredit berjangka pendek, berjangka menengah, dan berjangka panjang” (Prathama Rahardja,1990).

Definisi bank menurut Susatyo Reksodiprodjo (1986) adalah: Bank adalah sebuah perusahaan yang bertujuan memberikan kepuasan terhadap kredit, baik dengan modalnya sendiri dan dana-dana yang dipercayakan kepadanya maupun dengan mengedarkan pembayaran baru dalam bentuk uang kartal atau uang giral”.

Soetatwo Hadiwigeno dan Farid Wijaya (1991) mengemukakan pengertian bank adalah: ”Bank atau lembaga keuangan adalah lembaga yang membantu melancarkan pertukaran barang-barang dan jasa-jasa serta menyalurkan tabungan ke investasi”.

Lukman Dendawijaya (2000) memberikan definisi tentang bank adalah: ”Suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak “.

Sedangkan sesuai dengan UU No. 7 tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jika kita perhatikan dari pengertian-pengertian dan efisiensi-efisiensi para ahli tersebut di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan bank adalah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak disamping untuk mendapatkan keuntungan.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah bank milik pemerintah daerah. Bank Pembangunan Daerah menjadi Bank Umum sesuai dengan UU No.7 tahun 1992 (Widjanarto ;1993;47) dan terakhir diganti dengan UU No. 19 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Bank Pembangunan Daerah Papua adalah usaha milik daerah yang modal dan seluruh asetnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Provinsi Papua. BPD dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk barang/jasa dengan tujuan memperoleh laba untuk menunjang kontinuitas dan pertumbuhan perusahaan serta menjadi sumber PAD bagi daerah kota/kabupaten dan provinsi.

Sedangkan tujuan perbankan di Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

### **Sejarah Singkat Bank Papua.**

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Irian Jaya, didirikan pada tanggal 13 April 1966 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat Nomor : 37/GIB/1966 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Irian Barat Nomor 1 Tahun 1970 pada Lembaran Daerah Propinsi Irian Barat no. 42 tahun 1970, kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep.283/DDK/II/1972 tanggal 15 Juli 1972 tentang pemberian izin usaha Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana Bank Umum lainnya.

Jaringan kantor sebagai salah satu faktor pendukung operasional yang amat penting bagi suatu bank adalah tersedianya unit-unit layanan nasabah, yaitu berupa kantor maupun layanan ATM. Jaringan operasional PT. Bank Papua tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk memberikan layanan bagi para nasabah. Jaringan kantor PT. Bank Papua sampai saat ini sebanyak 71 kantor dan 21 ATM dan tergabung dengan jaringan ATM Bersama dengan jumlah peserta sebanyak 64 bank dengan 7500 lebih ATM dan Jaringan ATM Prima dengan jumlah 29 bank dengan jaringan 6500 lebih ATM yang tersebar di seluruh Indonesia.

### **Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari bahasa Romawi "*Credere*" yang berarti percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian (Kasmir, 2012.112).

Menurut Teguh Pudjo Muljono (2001), arti kata kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti "kepercayaan" atau dalam bahasa latin "*Creditum*" yang berarti kepercayaan atau kebenaran. Arti kata tersebut memiliki implikasi bahwa setiap kegiatan perkreditan harus dilandasi kepercayaan.

Menurut Taswan (2010) pengertian kredit yang telah kaprah (umum) digunakan di Indonesia adalah menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (revisi UU No. 14 tahun 1992) yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang ditetapkan.

Inilah sebabnya sampai batas-batas tertentu dasar kredit yang utama ialah kepercayaan dari semua pihak yang bersangkutan dengan perkreditan tersebut. Kredit pada dasarnya tergantung pada tiga hal, yaitu: Pertama, kepercayaan bahwa posisi materi dari si peminjam mampu mengembalikan modal yang dipinjam tersebut. Kedua, kepercayaan bahwa si peminjam akan mengembalikan uangnya. Ketiga, kepercayaan bahwa hukum-hukum yang sah dapat melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi kredit apabila ada yang dirugikan karena ada persyaratan yang dilanggar (Kadarsan, 1992).

Kredit dilihat dari tujuannya terdiri dari kredit konsumtif, kredit produktif dan kredit perdagangan. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit perdagangan yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktifitas perdagangannya.

Sedangkan dari segi jangka waktu, kredit terbagi atas 3 bagian yaitu kredit jangka pendek adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Kemudian kredit jangka menengah adalah merupakan kredit dengan jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sedangkan kredit jangka panjang adalah kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yakni di atas 3 tahun atau 5 tahun. (Kasmir, 2012:121).

Menurut UU Pokok Perbankan No. 10 tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Keuntungan merupakan tujuan dari pemberian kredit dalam bentuk bunga yang diterima.

Menurut Badriyah Harun (2010) jenis kredit menurut tujuan/kegunaannya :

- 1) Kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya. Kredit yang pengembaliannya tidak berdasarkan pada barang yang dibeli, melainkan pada penghasilan nasabah debiturnya.
- 2) Kredit investasi. Kredit jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka membiayai pengadaan aktiva tetap suatu perusahaan. Kebutuhan kredit dihitung dari barang modal yang diperlukan, rehabilitasi dan juga modernisasi barang. Penetapan jangka waktu disesuaikan dengan jadwal ketika investasi tersebut telah menghasilkan. Plafond yang disediakan untuk usaha berskala kecil sampai dengan Rp. 500.000.000,- sedangkan untuk usaha berskala menengah di atas Rp. 500.000.000,-s/d Rp. 5 milyar.
- 3) Kredit modal kerja. Kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Umumnya disediakan dalam bentuk rekening Koran. Agunannya lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat, persyaratan kredit memerhatikan perkembangan usaha agar jangan sampai penarikan total kredit mematikan usaha yang bersangkutan.

Menurut H. Salim (2007) jenis kredit berdasarkan jangka waktu :

- 1) Kredit jangka pendek. Kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
- 2) Kredit jangka menengah. Kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun, kecuali untuk kredit tanaman musiman.
- 3) Kredit jangka panjang. Kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008) jenis kredit berdasarkan golongan ekonomi :

- 1) Golongan ekonomi lemah. Kredit yang disalurkan pada pengusaha golongan ekonomi lemah, yang memiliki kekayaan maksimum sebesar Rp. 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.
- 2) Golongan ekonomi menengah dan konglomerat. Kredit yang diberikan pada pengusaha menengah dan besar.

### **Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit yang diberikan kepada UMKM baik langsung maupun melalui lembaga *linkage* yang memiliki kelayakan usaha dalam sektor ekonomi produktif namun belum bankable dalam bentuk kredit modal kerja atau investasi.

Program ini diperuntukkan untuk membantu pembiayaan yang dibutuhkan oleh UKM untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Sedangkan manfaat KUR bagi pemerintah adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UKM dalam rangka penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Program KUR diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin berwirausaha dari usaha kecil dan menengah.

### Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip pemberian kredit berdasarkan atas keyakinan bank akan kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari debitur.

Dalam dunia perbankan kelima factor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan “The five of credit analysis” atau prinsip 5 C (character, capacity, capital, collateral and condition). Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008,106) cara penilaian yang demikian bukan hal baru, karena dalam Undang-Undang Perbankan no. 14 Tahun 1967 telah diatur dan bank telah mempraktekkannya selama ini.

Meskipun demikian perlu dibahas satu persatu dari kelima factor diatas, sehingga akan menjadi jelas.

- 1) Watak (Character). Yang diperhatikan bank adalah sikap atau perilaku debitur yaitu bukan hanya nasabah dalam berhubungan dengan bank saja, tetapi meliputi juga dengan pihak yang lainnya.
- 2) Kemampuan (Capacity). Usaha yang dibiayai dengan kredit pada dasarnya nasabah harus dapat mengelola dengan baik, kalau tidak usaha nasabah tidak berkembang atau macet sama sekali. Yang diperhatikan bank disini terutama pimpinan perusahaan nasabah, selain mempunyai kemampuan memimpin perusahaan, juga menguasai bidang usaha serta kesungguhan mengelola usaha dengan baik dan menguntungkan.
- 3) Modal (Capital). Calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisis secara lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidaknya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkan.
- 4) Jaminan (Collateral). Syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit nasabah. Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap kredit yang disalurkan suatu bank harus mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu, jika terjadi kredit macet maka agunan inilah yang akan digunakan untuk membayar kredit tersebut.
- 5) Prospek (Condition of economy). Kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek permohonan kreditnya akan ditolak.

Selain prinsip 5C di atas, dapat pula ditambahkan satu lagi prinsip “C” (the C’of credit), yaitu kemampuan memperoleh pendapatan/laba (ability to create incomes). Kemampuan debitur mengembalikan kredit dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menghasilkan pendapatan/laba. Kemampuan ini dilatarbelakangi oleh pendidikan dan pengalaman, umur, kesehatan jasmani dan rohani, jenis dan jumlah pekerjaan tetap dan tambahan, serta organisasi tempat bekerja. (Siswanto Sutojo: 2007;36).

Metode analisis kredit kredit juga dapat dilakukan berdasarkan asas 7P, yang terdiri dari : (Kasmir :2008;110)

- 1) Personality : penilaian terhadap kepribadian nasabah.
- 2) Party : mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- 3) Purpose : untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- 4) Prospect : menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- 5) Payment : mengukur bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka semakin baik.
- 6) Profitability : menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- 7) Protection : memiliki tujuan bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

Prinsip pemberian kredit juga dapat ditambahkan dengan asas 3R terdiri dari : (Malayu S.P. Hasibuan .2008:108)

- 1) Returns. Penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit.
- 2) Repayment. Memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
- 3) Risk bearing ability. Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko, apakah perusahaan calon debitur resikonya besar atau kecil.

### **Usaha Kecil & Menengah**

Pasal 1 Undang-undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menerangkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 6 Undang-undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha-usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Usaha mikro
  - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
  - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha kecil
  - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha menengah
  - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria sebagaimana dimaksud diatas, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, dengan alamat Jln. A. Yani No. 5-7 Jayapura.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan studi kasus di Bank Papua. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang relevan dan akurat, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui

wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini di Bank Papua, sumber literature, internet, dokumen dan data pendukung lainnya. Sumber data adalah sebagai berikut : Studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada lembaga resmi yang menerbitkan data sekunder dalam hal ini adalah Bank Indonesia, Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik. Penelitian kepustakaan yaitu berupa informasi dan literature yang berhubungan dengan kredit, suku bunga dan pengusaha golongan menengah ke bawah.

### Populasi dan Sampel

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset, data yang dipakai dalam riset harusnya data yang benar (Umar Husein, 2011.49). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012.61).

Populasi dalam penelitian ini adalah usaha mikro kecil menengah yang memperoleh pinjaman KUR Bank Papua. Dipilihnya Bank Papua ini karena banyak usaha mikro kecil menengah yang telah berhasil menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat banyak .

Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling, dimana sampel diambil secara acak (Sugiyono, 2016.64), menurut Sugiyono dalam menentukan besarnya sampel tidak ada ketentuan yang mutlak (dalam hal ini berapa %). Pengambilan sampel penelitian ini diambil secara Random dengan menggunakan Simple Random Sampling yaitu pengambilan sampel secara acak dimana setiap unit dalam sampel mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai unit sampel.

Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah sampel dengan rumus Slovin (Umar Husein, 2008: 78), sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Dimana :

n adalah Jumlah Sampel; N adalah Banyak nasabah peminjam KUR Bank Papua; dan d adalah Presentase kelonggaran ketidaktepatan karena kesalahan yang masih dapat ditoleransi

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah usaha mikro dan kecil yang melakukan pinjaman modal melalui KUR Bank Papua dimana jumlah seluruh nasabah sebanyak 373 debitur penelitian sampel ini dipilih secara Simple Random Sampling dengan karakteristiknya sebagai berikut :

- 1) Tidak menjadikan semua nasabah sebagai sampel melainkan pemilihannya dari pelaku UMKM yang tidak mengalami keterlambatan dalam pembayaran.
- 2) Dipilihnya Bank Papua dengan pertimbangan banyak UMKM yang telah berhasil mengembangkan usahanya melalui pinjaman KUR yang direalisasikan oleh Bank Papua.
- 3) Yang menjadi nasabah peminjam KUR adalah mereka yang membutuhkan modal untuk usaha dan pengembangan usaha yang dijadikan sample. Perhitungan sampelnya dengan  $d= 10\%$  adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

$$n = \frac{373}{373 (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{373}{4,4}$$

n = 85 Sampel

**Tabel 3.**  
**Populasi Penelitian dan Sampel KUR UMKM**  
**Bank Papua Tahun 2017**

Sektor Ekonomi	Populasi	Sampel
Sektor Usaha Jasa	173	40
Sektor Usaha Perdagangan	200	45
Jumlah	373	85

Sumber: data diolah, 2017

Perhitungan sampelnya dengan d=10% untuk sektor usaha jasa :

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

$$n = \frac{173}{173 (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{173}{4,4}$$

n = 40 Sampel

Perhitungan sampelnya dengan d=10% untuk sektor usaha perdagangan :

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

$$n = \frac{200}{200 (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{200}{4,4}$$

n = 45 Sampel

### Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik : Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada debitur langsung dan jawaban-jawaban debitur dicatat secara sistematis (Soeratno, 2008 :86). Wawancara dilakukan secara berstruktur dimana peneliti menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Kuesioner sebagai jumlah pertanyaan tertulis guna untuk mengumpulkan informasi debitur (Umar Husein, 2008:49).

### Metode Analisis

Analisa data dibedakan menjadi dua, yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Analisa kualitatif dilakukan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, sedangkan analisa kuantitatif data yang dikumpulkan dalam jumlah besar (Soeratno, 2008:63). Metode analisa dalam penelitian ini meliputi :

### **Analisis Persepsi Debitur KUR dengan Evaluasi Nilai Efektifitas**

Dalam penilaian kinerja penyaluran KUR dilakukan dengan menilai efektivitas dari pihak bank dan pihak nasabah. Data untuk menganalisis kinerja penyaluran kredit dari pihak bank terdiri dari data mengenai target dan dan realisasi kredit, jangkauan kredit, frekuensi pinjaman dan persentase tunggakan. Sedangkan untuk menganalisis kinerja kredit dari pihak nasabah juga diperoleh data yang meliputi tanggapan, responden atas persyaratan awal, prosedur pinjaman, realisasi kredit, biaya administrasi, tingkat bunga, jaminan atau agunan, dan pelayanan petugas. Selain itu terdapat data mengenai pendapatan responden yang meliputi pendapatan sebelum dan sesudah menerima kredit.

Pengukuran menggunakan skala likert dan dilakukan dengan menghadapkan responden pada sebuah pernyataan, kemudian responden diminta untuk memberi jawaban tanggapan yang terdiri dari tiga tingkatan dan kemudian jawaban – jawaban tersebut diberi skor. Skor terbesar diberikan untuk jawaban yang paling mendukung. Penentuan jenjang tiga (1,2,3) digunakan dengan mempertimbangkan bahwa kelompok debitur adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan yang masih relative rendah, sehingga kurang mampu membedakan jawaban secara lebih tajam. Pemberian skor pada tahap-tahap pernyataan yaitu jawaban yang mendukung pernyataan “1” (mudah, ringan, cepat dan baik) diberi skor nilai tiga. Sedangkan jawaban “3” (berat, sulit, lama dan buruk) diberi skor nilai satu. Penilaian tanggapan responden terhadap penyaluran kredit akan dibagi menjadi tiga kategori yang menentukan efektivitas.

Berdasarkan skor yang diperoleh dari tanggapan responden kemudian ditentukan rentang skala atau selang untuk menentukan efektivitas penyaluran KUR. Selang atau skala diperoleh dari selisih total skor tertinggi yang mungkin dengan total skor minimal yang mungkin dibagi jumlah kategori jawaban.

$$\text{Selang} = \frac{\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal}}{\text{Jumlah Kategori Jawaban}}$$

Dari selang yang didapat maka dapat ditentukan skor efektivitas penyaluran KUR yaitu dengan membagi tiga diantara total nilai minimal yang mungkin sampai total nilai maksimal yang mungkin didapat menjadi tiga selang efektivitas. Selang terendah menyatakan bahwa efektivitas kredit tidak efektif, sedangkan selang tertinggi menyatakan bahwa penyaluran kredit efektif.

Ada tiga kategori penilaian tanggapan debitur terhadap pelayanan penyaluran kredit yaitu efektif, cukup, dan tidak efektif. Nilai skor adalah antara 595-1785 (angka ini berdasarkan pengalihan skor terendah dan tertinggi dengan jumlah parameter debitur yang ada). Angka skor terendah 595 diperoleh dari hasil kali antara jumlah responden sebesar 85 dan jumlah parameter yang ada yaitu tujuh. Sedangkan angka 1785 diperoleh ( $3 \times 7 \times 85 = 1785$ ) dari hasil penjumlahan skor maksimum dari setiap parameter  $\sum$  (skor maksimum 3 dikali jumlah debitur). Selang untuk setiap tingkat penilaian keefektifan adalah 396 yang diperoleh dari hasil pengurangan skor tertinggi dan skor terendah kemudian dibagi dengan banyaknya kategori penilaian atau dapat juga ditulis  $(1785 - 595) : 3 = 396$ , setelah nilai selang ditentukan maka selanjutnya dapat ditentukan rentang skala untuk setiap kategori penilaian efektivitas. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.**  
**Skor Penilaian Efektifitas**

<b>Kategori Penilaian</b>	<b>Total Skor</b>
Tidak Efektif	595 - 991
Cukup Efektif	992 - 1388
Efektif	1389 - 1785

*Sumber: data diolah, 2017.*

Berdasarkan Tabel diatas bila total skor berada diantara 595-991, maka penyaluran KUR dinilai tidak efektif. Efektif mengidentifikasikan bahwa apa yang menjadi harapan debitur sudah tercapai sesuai dengan tujuan pihak bank, dalam hal ini penyaluran KUR, sedangkan bila nilai total skornya 992-1388 penyaluran

KUR dinilai sudah cukup efektif yang berarti tujuan pihak bank dan harapan responden sudah tercapai. Akan tetapi responden masih merasakan masih ada harapan yang kurang tercapai, hal ini dapat dilihat dari skor efektivitas yang dinilai paling kecil. Dan untuk total skor 1389-1785 berarti penyaluran KUR dinilai efektif. Hal ini berarti harapan responden tidak sejalan dengan tujuan dari pihak bank agar penyaluran KUR efektif sehingga tidak bermanfaat bagi debitur.

**Analisis Perbedaan Pendapatan Nasabah**

Analisis pendapatan nasabah KUR dari sektor usaha jasa dan sektor usaha perdagangan Bank Papua dalam penelitian ini dilakukan dengan uji t-test beda rata – rata sampel berpasangan (Sugiyono, 2012: 122). Untuk mempermudah dan mempercepat pengolahan data serta agar hasilnya lebih tepat dan akurat, maka analisis ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang tersedia yaitu SPSS. Adapun yang dianalisis.

**Uji Mean**

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata – rata dari kelompok tersebut. Rata – rata didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut (Sugiyono 2012 : 49), dengan rumus :

$$Me = \frac{\sum xi}{N}$$

Dimana :

Me = Mean (Rata-rata);  $\sum$  = Epsilon (dibaca jumlah); xi = Nilai x ke i sampai n; N = Jumlah Debitur

Analisa mean ini dilakukan untuk mengetahui rata – rata pendapatan nasabah KUR sektor usaha jasa dan sektor usaha perdagangan di Bank Papua.

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Dimana :

S = Simpangan baku;  $\sum$  = Epsilon (dibaca jumlah); xi = Nilai x ke i sampai n;  $\bar{x}$  = Nilai rata – rata; dan n = Jumlah debitur

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat simpangan baku pendapatan nasabah KUR sektor usaha mikro dan sektor usaha ritel di Bank Papua.

**Uji Korelasi**

Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi / hubungan (measures of association). Korelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variable yang diuji, dengan rumus :

$$rx1x2 = \frac{\sum x1x2}{\sqrt{\sum x1^2 \sum x2^2}}$$

Dimana :

rx1x2 = Korelasi antara variable x1 dan x2;  $\sum$  = Epsilon (dibaca jumlah); x1 = (x1i – x1); x2 = (x2i – x2)

### Uji T Berpasangan

Uji T berpasangan dilakukan untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan pendapatan dari dua variable yang diuji. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan dua sampel yang berpasangan. Dua sampel berpasangan diartikan sebagai sampel dengan subyek yang sama namun mengalami perlakuan atau pengukuran yang berbeda dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} - 2r \left(\frac{S_1}{\sqrt{n_1}}\right) \left(\frac{S_2}{\sqrt{n_2}}\right)}}$$

Dimana :

- $\bar{x}_1$  = Rata – rata sampel 1
- $\bar{x}_2$  = Rata – rata sampel 2
- $s_1$  = Simpangan baku sampel 1
- $s_2$  = Simpangan baku sampel 2
- $s_1^2$  = Varians sampel 1
- $s_2^2$  = Varians sampel 2
- $n_1$  = Jumlah sampel 1
- $n_2$  = Jumlah sampel 2

Hasil analisis tersebut akan menunjukkan apakah hipotesis terbukti atau tidak, sehingga dapat diambil keputusan yang tepat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Debitur untuk penelitian ini adalah nasabah penerima KUR Bank Papua serta debitur yang diambil dari petugas bank itu sendiri. Karakteristik debitur memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit.

### Karakteristik Debitur

Adapun karakteristik debitur yang dianalisa digambarkan menurut umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

#### Umur dan Jenis Kelamin

Umur memiliki pengaruh pada kinerja KUR. Masyarakat yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mempunyai usaha berhak mendapatkan bantuan kredit. Hal ini tentu saja dengan tetap mengacu pada asas-asas yang berlaku di pihak bank. Umur menunjukkan usia produktif nasabah dalam menjalankan usahanya. Jika usia nasabah masih tergolong produktif berarti masih besar kemungkinan meminjam kredit untuk mengembangkan usahanya. Hal ini merupakan keuntungan dari pihak bank karena dapat meningkatkan persentase realisasi penyaluran kredit. Umur responden dalam penelitian ini yang terendah adalah 26 tahun sedangkan yang tertinggi adalah 56 tahun. Umur debitur dibagi dalam lima kelas dengan lebar kelas sebesar 6.

Data mengenai sebaran debitur nasabah KUR Bank Papua tahun 2017 berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 5.**  
**Sebaran Debitur KUR Bank Papua Berdasarkan Umur dan**  
**Jenis Kelamin Tahun 2017**

Pengelompokan	Debitur KUR	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Umur :		

26 – 32 tahun	19	22,35
33 – 39 tahun	30	35,29
40 – 46 tahun	18	21,18
47 – 53 tahun	15	17,65
54 – 60 tahun	3	3,53
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>100</b>
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	64	75,29
Perempuan	21	24,71
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>100</b>

Sumber data : diolah 2017

Dapat digambarkan bahwa dari masing-masing kelompok debitur menunjukkan usia 33-39 tahun memegang jumlah terbesar sebagai debitur, yaitu sebesar 35,29 persen. Hal ini terjadi karena pada rentang usia tersebut merupakan usia produktif yang banyak digunakan orang untuk melakukan aktifitas, sehingga dengan usia yang masih produktif para pelaku usaha diharapkan masih bisa bekerja secara maksimal apalagi dengan bantuan kredit yang diberikan oleh bank. Akan tetapi faktor usia tidak membatasi para pelaku usaha untuk terus mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya debitur yang walaupun usianya sudah tidak tergolong produktif lagi yaitu 54-60 tahun sebesar 3.53 persen (3 orang), namun mereka masih mampu menjalankan usahanya bahkan terus mengembangkan usahanya dengan meminjam modal kepada pihak bank.

Berdasarkan jenis kelamin, debitur KUR sebagian besar adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 75,29% (64 orang), sedangkan sisa responden berjenis kelamin perempuan sebesar 24,71% (21 orang). Debitur lebih didominasi oleh laki-laki, karena peran laki-laki dalam memenuhi kebutuhan keluarga sangat besar dimana usaha yang dijalankan sebagian besar merupakan sumber pendapatan utama karena laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga di keluarganya. Hal ini juga dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak bank karena kemungkinan nasabah terus melakukan pinjaman cukup besar.

**Status Pernikahan**

Status pernikahan merupakan salah satu karakteristik responden yang dibahas dalam penelitian ini. Status pernikahan memiliki pengaruh dalam kinerja penyaluran kredit karena adanya tanggungan keluarga. Banyaknya tanggungan keluarga memperkecil peluang nasabah untuk mengembalikan besarnya pinjaman. Hal ini karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk tanggungan keluarganya. Kondisi tersebut mempengaruhi kinerja penyaluran kredit karena dapat meningkatkan persentase tunggakan yang ada di bank.

Status pernikahan debitur KUR sebagian besar adalah responden yang sudah menikah yaitu sebesar 90,58% (77 orang). Sedangkan responden yang belum menikah sebesar 9,42% (8 orang). Dari 90,57% (77 orang) responden yang sudah menikah, sebagian besar responden memiliki jumlah anggota keluarga 2 hingga 5 orang.

**Tabel 6.**  
**Sebaran Debitur KUR Bank Papua Tahun 2017**  
**Berdasarkan Status Pernikahan**

Pengelompokan	Debitur KUR	
	Jumlah Orang	Persentase
Menikah	77	90,58%
Belum Menikah	8	9,42%
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>100</b>

Sumber data : diolah 2017

### Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi pengetahuan yang diketahui orang tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, pengetahuan yang didapat semakin baik. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kinerja penyaluran kredit. Hal ini dapat dilihat dari rasa tanggung jawab yang dimiliki. Rasa tanggung jawab tersebut mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar angsuran kredit dengan tepat waktu. Sehingga dapat memperkecil persentase tunggakan. Gambaran umum mengenai tingkat pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada Tabel di bawah. Dapat dilihat bahwa tidak ada responden yang tidak bersekolah namun jumlah tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) responden KUR yaitu 3,53% (3 orang). Ini menunjukkan bahwa KUR memiliki karakteristik responden dengan pendidikan yang cukup, walaupun hanya 29,41% responden atau 25 orang tingkat pendidikannya tamat hingga perguruan tinggi. Sehingga dalam hal ini KUR di Bank Papua harus menyikapinya dengan terus menyesuaikan kebijakan pelayanan yang sesuai dengan segmen responden di atas. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 7.**  
**Sebaran Debitur KUR Bank Papua Tahun 2017**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pengelompokan	Debitur KUR	
	Jumlah Orang	Persentase
SD	3	3,53
SMP/Sederajat	16	18,82
SMA/Sederajat	41	48,24
Perguruan Tinggi	25	29,41
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>100</b>

*Sumber data : diolah 2017*

### Profil Usaha Debitur

KUR merupakan kredit untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah dalam pengembangan usahanya, oleh karena itu Bank Papua telah banyak melayani pengusaha kecil dalam berbagai bidang. Sebelum menilai lebih jauh bagaimana kinerja penyaluran KUR itu sendiri maka perlu diketahui profil usaha yang dibiayai oleh KUR.

### Jenis Usaha

Jenis usaha yang dilakukan responden KUR terdiri dari sektor usaha jasa dan sektor usaha perdagangan. Sektor usaha jasa adalah usaha yang tidak memperjualbelikan barang, jadi mereka mengandalkan jasa atau keahlian mereka dalam menjalankan usahanya contohnya usaha rental, transportasi untuk proyek, sedangkan usaha perdagangan adalah usaha yang memperjualbelikan barang contohnya usaha sembako, toko pakaian, toko mainan anak-anak dll.

Jenis usaha yang dilakukan dapat mempengaruhi kinerja penyaluran kredit karena semakin besar usaha maka membutuhkan modal yang lebih besar. Hal ini menjadi keuntungan pihak bank karena dengan banyak yang melakukan pinjaman dapat meningkatkan jumlah realisasi kredit yang disalurkan. Jenis usaha yang dilakukan debitur secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 8.**  
**Sebaran Debitur KUR Bank Papua Tahun 2017**  
**Berdasarkan Jenis Usaha**

Pengelompokan	Debitur KUR	
	Jumlah Orang	Persentase (%)
Sektor Jasa	40	47,06
Sektor Perdagangan	45	52,94
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>100</b>

Sumber data : diolah 2017

Sebesar 52,94% usaha yang dibiayai oleh KUR Bank Papua adalah sektor perdagangan, dan 47,06% adalah sektor jasa.

**Lama Usaha**

Usaha yang dibiayai oleh KUR minimal telah berum. Hal ini dapa kepada nasabah. Lama usaha responden KUR adalah antara 1 hingga 16 tahun yang dibagi dalam 5 kelas dengan lebar kelas sebesar 3. Gambaran umum mengenai lama usaha responden KUR dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 9.**  
**Sebaran Debitur KUR Bank Papua Tahun 2017**  
**Berdasarkan Lama Usaha**

Pengelompokan	Debitur KUR	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Lama Usaha :		
1 – 3 tahun	32	37,65
4 – 7 tahun	29	34,12
8 – 11 tahun	15	17,65
12 – 15 tahun	7	8,23
16 – 19 tahun	2	2,35
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>100</b>

Sumber data : diolah 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebesar 37,65 (32 orang) dari total seluruh responden telah menjalankan usahanya selama 1 hingga 3 tahun. Walaupun berada pada rentang yang cukup dalam melakukan usahanya, akan tetapi responden mempercayakan kepada Bank Papua ketika responden ingin meminjam uang untuk menambah modal usahanya.

Kemudian sebesar 34,12% (29 orang) dengan lama usaha 4 hingga 7 tahun, sebesar 17,65 % (15 orang) dengan lama usaha 8 hingga 11 tahun, sebesar 8,23% (7 orang) dengan lama usaha 12 hingga 15 tahun, sedangkan sisanya sebesar 2,35% (2 orang) dengan lama usaha 16 hingga 19 tahun.

Gambaran umum lama usaha yang telah dijalankan responden menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah KUR memiliki pengalaman usaha yang cukup lama.

**Lokasi Usaha dan Status Usaha**

Usaha debitur yang merupakan usaha mikro kecil dan menengah memiliki karakteristik lokasi usaha dimana digunakan sebagai tempat usaha mereka berada dan status usaha yaitu mengenai status kepemilikan dari lokasi yang dijadikan tempat usaha mereka. Lokasi dan status usaha debitur berpengaruh terhadap kinerja penyaluran KUR karena berpeluang untuk meningkatkan atau menurunkan persentase tunggakan. Gambaran umum mengenai lokasi usaha dan status usaha dapat dilihat pada Tabel berikut di bawah ini.

**Tabel 10.**  
**Sebaran Debitur KUR Bank Papua Tahun 2017**  
**Berdasarkan Lokasi Usaha dan Status Usaha**

Pengelompokan	Debitur KUR	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Lokasi Usaha :		
Lingkungan tempat tinggal	41	48,23
Pasar tradisional	12	14,12
Kombinasi keduanya	32	37,65
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>100</b>
Status Usaha :		
Milik sendiri	74	87,06
Sewa	11	12,94
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>100</b>

Sumber data : diolah 2017

Sebagian besar lokasi usaha nasabah berada di lingkungan tempat tinggal dengan persentase sebesar 48,23 % (41 orang) sedangkan sisanya 14,12% (12 orang) berada di pasar tradisional yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal responden dan sebesar 37,65% lokasi usahanya berada di lingkungan tempat tinggal dan juga pasar tradisional. Berdasarkan status usahanya, sebagian besar responden adalah milik sendiri yaitu sebesar 87,06% atau 74 orang dan 12,94% atau 11 orang.

#### **Frekuensi Pinjaman**

Frekuensi pinjaman yang dilakukan oleh responden menggambarkan kepercayaan responden kepada pihak pemberi kredit dalam hal ini adalah Bank Papua. Semakin sering atau semakin besar frekuensi pinjaman yang dilakukan nasabah berarti nasabah tersebut telah mempercayakan peminjaman modal kepada pihak bank sehingga terus melakukan pinjaman. Frekuensi pinjaman yang dilakukan nasabah dapat meningkatkan kinerja penyaluran kredit. Hal ini karena dengan terus melakukan pinjaman dapat meningkatkan realisasi kredit yang disalurkan pihak bank sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan. Frekuensi pinjaman terendah nasabah adalah 1 kali dan tertinggi adalah 5 kali yang akan dibagi ke dalam 5 kelas. Data frekuensi pinjaman yang dilakukan responden dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 11.**

**Sebaran Debitur KUR Bank Papua Tahun 2017  
Berdasarkan Jumlah Frekuensi Pinjaman**

Pengelompokan	Debitur KUR	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Frekuensi Pinjaman :		
1 kali	39	45,88
2 kali	19	22,35
3 kali	14	16,47
4 kali	9	10,59
5 kali	4	4,71
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>100</b>

Sumber data : diolah 2017

Berdasarkan hasil penelitian, pada Tabel 5.7 dapat terlihat bahwa sebagian besar responden sebanyak 45,88% (39 orang) telah melakukan pinjaman. Hal ini dapat mengindikasikan tingginya tingkat kepercayaan responden kepada pihak bank dalam hal ini Bank Papua untuk melakukan pinjaman kredit untuk menambah modal bagi pengembangan usaha responden.

Sedangkan sisanya sebesar 54,12% melakukan frekuensi pinjaman antara 2 hingga 5 kali, pihak bank pun tidak perlu lagi melakukan survey kembali ketika responden ingin melakukan pinjaman lagi. Selain itu responden yang taat peraturan (membayar tepat pada waktunya) akan lebih dipercaya oleh bank dalam memberikan pinjaman kepada respondennya. Banyaknya frekuensi pinjaman yang dilakukan nasabah mencerminkan tingkat kepercayaan nasabah untuk terus mengajukan pinjaman KUR.

#### **Jumlah Modal**

Sebelum melakukan pinjaman kredit kepada pihak bank, tentunya responntukden memulai usahanya terlebih dahulu menggunakan modal sendiri baik dengan uang tabungan milik sendiri atau dengan meminjam pada saudara atau orang terdekat lainnya. Untuk melakukan pinjaman, pihak nasabah diharuskan memiliki jumlah modal sendiri sebesar 70%. Rasio persentase perbandingan modal sendiri dengan modal pinjaman dari bank adalah 70 : 30. Untuk mengajukan permohonan kredit diperlukan adanya agunan. Nilai agunan harus sesuai dengan nilai kredit yang diajukan ditambah atau setara dengan nilai pokoknya.

**Pembahasan**

**Implementasi KUR Menurut Penilaian Bank.**

Dalam penelitian ini, implementasi KUR dapat dilihat dari pihak bank dan pihak nasabah. Penilaian menurut pihak bank dilihat dari target dan pencairan kredit, persentase tunggakan, dan frekuensi pinjaman. Adapun hasil dari penelitian terhadap hal – hal tersebut adalah sebagai berikut :

**Target dan Realisasi Kredit**

Target dan realisasi kredit Bank Papua dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 12.**  
**Target dan Realisasi KUR Bank Papua**  
**Tahun 2014-2016**

Posisi	Target (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Persentase (%)
<b>Desember tahun 2014</b>	<b>13.305</b>	<b>13.359</b>	<b>100,40%</b>
<b>Desember tahun 2015</b>	<b>13.890</b>	<b>13.207</b>	<b>95,08%</b>
<b>Desember tahun 2016</b>	<b>14.000</b>	<b>14.209</b>	<b>101,49%</b>

Sumber data : Bank Papua 2016.

Data pada tabel dia atas menunjukkan bahwa Bank Papua dalam hal pencapaian target atau realisasi KUR tahun 2014 mencapai di atas target yang telah ditetapkan sebesar 100,40 %. Tahun 2015 tidak tercapai target yaitu sebesar 95,08% karena banyaknya persaingan bisnis perbankan yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI yang melayani kredit sejenis KUR Mikro, KUR Ritel atau kredit lainnya. Tetapi pada tahun 2016 realisasi KUR melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 101,49 % karena adanya perubahan system dalam pendekatan, pembinaan, pemasaran kepada nasabah KUR.

**Persentase Tunggakan**

Fungsi pembinaan dan pengawasan dalam perkreditan adalah untuk mengantisipasi atas timbulnya resiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit. Persentase tunggakan yang terjadi dapat mempengaruhi nilai NPL pihak bank yang berpengaruh pada kinerja penyaluran kredit.

**Tabel 13.**  
**Persentase Tunggakan Terhadap Sisa Pinjaman KUR Bank Papua**  
**Tahun 2014-2016**

Posisi	Sisa Pinjaman (Rp)	Tunggakan (Rp)	Persentase (%)	NPL
Desember 2014	<b>13.359</b>	<b>340</b>	<b>2,54</b>	<b>16,28%</b>
Desember 2015	<b>13.207</b>	<b>134</b>	<b>1,01</b>	<b>22,22%</b>
Desember 2016	<b>14.209</b>	<b>74</b>	<b>0,52</b>	<b>17,53%</b>

Sumber data : Bank Papua 2016.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa tunggakan cenderung menurun dari tahun ke tahunnya. Hal ini berarti kinerja penyaluran KUR dapat dinilai baik. Tunggakan mengalami penurunan disebabkan adanya perbaikan kinerja Bank Papua dalam menyeleksi calon nasabah dan membina nasabah lama dalam proses pengembalian kredit pinjamannya.

**NPL (Non Performing Loan)**

Non Performing Loan adalah kredit dengan koleabilitas kurang lancar, diragukan dan koleabilitas macet. Kredit bermasalah merupakan kondisi yang sering terjadi pada bisnis perbankan yaitu sebagai resiko dari penyaluran kredit, walaupun kredit bermasalah sulit untuk dihindarkan namun bank harus tetap mengelolanya secara hati – hati dan sedapat mungkin diminimalkan resikonya sehingga dapat memberikan keuntungan.

Penyebab timbulnya NPL (Non Performing Loan) dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :Sisi debitur, antara lain : Etiket tidak baik dari debitur; Menurunnya usaha debitur yang dapat mengakibatkan turunnyanya kemampuan debitur untuk membayar angsuran; Pengelolaan usaha debitur tidak berjalan baik dan Penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula. Sisi intern Bank Papua, antara lain : Etiket tidak baik dari karyawan Bank Papua; Kekurangmampuan karyawan Bank Papua dalam mengelola pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai kredit dicairkan dan; Kelemahan dan kurang efektifnya karyawan Bank Papua dalam membina debitur. Sedangkan darSisi Ekstern Bank Papua, antara lain : Keadaan force majeure yaitu suatu kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, contohnya : peperangan, bencana alam, kebakaran dll.; Akibat perubahan eksternal lingkungan seperti perubahan kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan, kenaikan harga/biaya-biaya, dan lain sebagainya yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap usaha debitur dan; pemutusan hubungan kerja (PHK)

#### **Loan to Deposit Rasio (LDR)**

Loan to Deposit Ratio adalah perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap jumlah dana pihak ketiga dari masyarakat yang berhasil dihimpun. LDR merupakan indicator yang menjadi tolak ukur terhadap fungsi intermediasi perbankan, semakin tinggi nilai indikator LDR maka kinerja bank semakin baik.

**Tabel 14.**  
**Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Papua**  
**Tahun 2014-2016**

Posisi	Pinjaman Rp	Simpanan Rp	LDR %
Desember 2014	13.359	16.673	80,12
Desember 2015	13.207	15.906	83,03
Desember 2016	14.209	16.569	85,76

*Sumber data : Bank Papua 2016*

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa LDR Bank Papua dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, tahun 2014 LDR 80,12%, tahun 2015 naik menjadi 83,03% meskipun dari segi simpanan dana dari pihak ketiga mengalami penurunan sebesar 767 akan tetapi untuk LDR mengalami kenaikan sebesar 2,91% karena tetap meningkatnya jumlah pinjaman kredit, tahun 2016 LDR sebesar 85,76%, semakin tinggi nilai LDR maka kinerja Bank Papua semakin baik karena seluruh dana yang terhimpun dari masyarakat dapat tersalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

#### **Analisis Persepsi Debitur KUR**

Kesesuaian pelayanan kredit oleh bank yang didasarkan pada kebutuhan nasabah merupakan tugas suatu bank yang perlu ditingkatkan. Pengukuran tingkat pelayanan kredit dapat dilakukan berdasarkan persepsi nasabah terhadap system perkreditan yang ada. Untuk mengetahui persepsi tersebut maka responden diminta untuk memberikan tanggapan terhadap faktor-faktor yang dianggap dapat menentukan kinerja kredit. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah persyaratan awal, prosedur pinjaman, realisasi kredit, biaya administrasi, tingkat bunga, jaminan atau agunan, dan pelayanan petugas bank.

Respon nasabah KUR Bank Papua tahun 2017 atas persyaratan awal yang diajukan oleh Bank Papua untuk mengajukan pinjaman kredit dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 15.**  
**Respon Debitur KUR Bank Papua Tahun 2017**  
**Terhadap Persyaratan awal KUR**

Kategori	Skor Nilai	Penilaian Debitur	
		Frekwensi	Persentase
Mudah	3	73	85,88
Sedang	2	12	14,12

Sulit	1	0	0
<b>Total</b>		<b>85</b>	<b>100</b>

Sumber data: diolah 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 85 debitur yang diminta tanggapannya terhadap persyaratan awal yang ditentukan pihak bank dan harus dipenuhi oleh calon nasabah, sebanyak 73 responden (85,88%) menyatakan mudah, dan 10 responden (14,12%) menyatakan sedang. Debitur yang menyatakan mudah merasa tidak mengalami kesulitan apapun untuk memenuhi persyaratan yang diajukan pihak bank. Sedangkan responden yang menyatakan sedang itu dikarenakan debitur mengalami sedikit kendala pada saat mengajukan Surat Keterangan Usaha di pemerintah daerah tempat mereka tinggal, sebagian dari responden harus mengeluarkan biaya agar responden mendapatkan Surat Keterangan Usaha untuk kemudian diberikan kepada pihak bank untuk permohonan pinjaman. Dengan begitu, penyaluran kredit dapat dinilai baik karena persyaratan awal yang ditentukan tidak menyulitkan calon nasabah.

**Prosedur Pinjaman**

Tahapan yang harus dilalui sejak proses permohonan hingga realisasi kredit kepada nasabah adalah prosedur yang harus dilalui oleh calon nasabah dalam permohonan pinjaman atau kredit. Pendaftaran permohonan pinjaman atau kredit dilakukan di kantor Bank Papua oleh calon nasabah, petugas bank memeriksa kelengkapan berkas yang diberikan oleh calon nasabah sebagai persyaratan awal dalam mengajukan kredit. Setelah itu calon nasabah diminta mengajukan jumlah pinjaman yang dikehendaki dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh calon nasabah itu sendiri. Pengajuan jumlah pinjaman juga disesuaikan dengan agunan yang dimiliki calon nasabah. Setelah petugas bank memeriksa semua kelengkapan berkas yang diberikan nasabah, tahapan selanjutnya adalah calon nasabah menunggu giliran untuk diadakan pemeriksaan secara langsung oleh petugas bank ke tempat usaha calon nasabah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa apakah usaha calon nasabah layak dibiayai atau tidak, selain itu petugas juga memeriksa bukti kepemilikan agunan yang dimiliki calon nasabah. Apabila setelah diperiksa hasilnya adalah usahanya layak untuk dibiayai, maka petugas bank segera menyusun laporan untuk kemudian diberikan kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.

Respon nasabah KUR Bank Papua tahun 2017 atas prosedur pinjaman dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 16.**  
**Respon Debitur KUR Bank Papua Tahun 2017 Terhadap**  
**Prosedur Pinjaman Penyaluran KUR**

Kategori penilaian	Skor nilai	Penilaian Debitur	
		Frekwensi	Persentase
Tidak rumit & prosesnya cepat	3	46	54,12
Tidakrumitnamun prosesnya lama	2	30	35,29
Rumitdanproses nya lama	1	9	10,59
<b>Total</b>		<b>85</b>	<b>100</b>

Sumber: data diolah, 2017

Berdasarkan penilaian nasabah terhadap prosedur pinjaman di Bank Papua, sebanyak 46 debitur atau 54,12% debitur menyatakan prosedur pinjaman permohonan kredit dianggap tidak rumit dan prosedurnya cepat, 35,29% debitur menyatakan bahwa prosedur pinjaman tidak rumit namun prosesnya lama, hal ini dikarenakan menunggu giliran untuk diperiksa usahanya oleh petugas bank. Banyaknya berkas pengajuan permohonan kredit yang diajukan kepada pihak bank menyebabkan hal tersebut, disamping itu jumlah petugas bank yang memeriksa pun terbatas yaitu hanya 2 orang. Responden yang menyatakan bahwa proses prosedur pinjaman itu lama dan prosesnya rumit sebanyak 9 responden (10,59%). Hal ini terjadi karena selain menunggu giliran untuk diperiksa usahanya oleh petugas bank, ada juga calon nasabah yang mengalami pengecekan ulang terhadap usahanya dimana hal tersebut dianggap agak memperlambat

pemutusan dan pencairan kredit yang mereka ajukan. Adanya pengecekan ulang terhadap usaha calon nasabah ini biasanya karena laporan yang diajukan petugas bank kepada pihak yang berwenang memutuskan kredit belum disetujui atau calon nasabah tersebut pernah masuk daftar hitam karena dulu pernah menunggak sehingga perlu pengecekan yang lebih mendalam baik usahanya maupun karakter calon nasabah tersebut. Namun begitu, penyaluran KUR sudah dapat dinilai baik karena sebagian besar responden mengatakan bahwa prosedur pinjaman tersebut mudah.

### **Biaya Administrasi**

Biaya yang dikeluarkan selama proses permohonan kredit sampai direalisasikan merupakan biaya administrasi pinjaman yang harus dikeluarkan oleh nasabah berdasarkan jumlah besar pinjaman (plafon) sebagai berikut :

1. Besar pinjaman  $\leq$  Rp. 20.000.000,- biaya terdiri dari :
 

Biaya administrasi (percetakan)	Rp. 25.000,-
Biaya meterai 4 x Rp. 6.000,-	Rp. 24.000,-
(kwitansi, SPH, surat pernyataan, kuasa menjual )	
Total	Rp. 49.000,-
2. Biaya pinjaman Rp. 20.000.000,- — Rp. 50.000.000,-
 

Biaya administrasi (percetakan)	Rp. 50.000,-
Biaya meterai 4 x Rp. 6.000,-	Rp. 24.000,-
(kwitansi, SPH, surat pernyataan, kuasa menjual )	
Total	Rp. 74.000,-
3. Biaya pinjaman Rp. 50.000.000 — Rp. Rp. 100.000.000,-
 

Biaya administrasi (percetakan )	Rp. 100.000,-
Biaya meterai 4 x Rp. 6.000,-	Rp. 24.000,-
(kwitansi, SPH, surat pernyataan, kuasa menjual )	
Provisi 0,1 % x besar pinjaman	Rp. 50.000,-
Rp. 50.000.000,-	
Total	Rp. 174.000,-

**Tabel 17.**

**Respon Debitur KUR Bank Papua Tahun 2017 Terhadap  
 Biaya Administrasi Penyaluran KUR**

Kategori Penilaian	Skor Nilai	Penilaian Debitur	
		Total Skor	Persentase
Ringan	3	70	82,35
Sedang	2	15	17,65
Berat	1	0	0
<b>Total</b>		<b>85</b>	<b>100</b>

Sumber: data diolah, 2017

Sebanyak 82,35 % debitur atau 70 orang menyatakan biaya administrasi yang harus dikeluarkan dalam permohonan kredit dinilai ringan. Sedangkan sisanya sebanyak 17,65 % atau 15 orang menyatakan biaya yang dikeluarkan terbilang sedang. Responden menyatakan bahwa biaya administrasi yang mereka keluarkan tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah nominal pinjaman kredit yang mereka peroleh dari bank. Oleh karena itu dalam hal ini penyaluran KUR dapat dikatakan baik karena calon nasabah tidak ada yang merasa keberatan dengan biaya administrasi yang harus dikeluarkan.

### **Pencairan Kredit**

Pencairan kredit merupakan waktu cairnya kredit setelah melalui tahapan proses dengan melihat ketepatan pada setiap proses yang dilakukan sejak pengajuan pinjaman. Pencairan kredit dapat dinilai cepat apabila dalam jangka waktu paling lambat satu minggu kredit yang disetujui sudah dapat diterima oleh

nasabah. Respon debitur KUR Bank Papua tahun 2017 terhadap pencairan kredit dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 18.**  
**Respon Debitur KUR Bank Papua Tahun 2017 Terhadap Pencairan Kredit Penyaluran KUR**

Kategori Penilaian	Skor Nilai	Penilaian Debitur	
		Frekwensi	Persentase
Paling lambat 1 minggu sejak pengajuan pinjaman	3	50	58,82
1 – 2 minggu dari sejak pengajuan pinjaman	2	28	32,94
Lebih dari 2 minggu dari sejak pengajuan pinjaman	1	7	8,24
<b>Total</b>		<b>85</b>	<b>100</b>

Sumber data : diolah 2017

Berdasarkan respon terhadap pencairan kredit, 58,82% atau 50 responden menyatakan proses pencairan kredit dinilai cepat karena sebelum satu minggu kredit mereka sudah cair, rata-rata pencairan kredit responden adalah 3 sampai 4 hari. Sebanyak 32,94% atau 28 responden pencairan kreditnya melebihi satu minggu karena harus melalui beberapa tahap proses pencairan kredit terlebih dahulu, jadi jumlah kredit mereka yang disetujui tidak cair atau tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan. Sedangkan sebanyak 8,24% atau 7 responden mengalami keterlambatan pencairan kredit karena menunggu giliran persiapan berkas dokumen realisasi dan penandatanganan oleh notaris baru kreditnya dapat diterima. Dengan hal ini, penyaluran KUR dapat dikatakan baik karena sebagian besar responden tidak memerlukan waktu yang lama untuk menerima kredit dan walaupun ada sebagian responden yang harus menunggu dalam waktu yang sedikit lama, hal itu bukan disebabkan oleh kelalaian petugas bank.

**Tingkat Bunga**

Tingkat bunga adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah sebagai bentuk dukungan operasional kegiatan bagi bank. Tingkat suku bunga kredit ini ditetapkan agar dapat menutup seluruh pembiayaan baik biaya operasional, biaya resiko kredit, serta merupakan keuntungan yang digunakan untuk menjaga kelangsungan dan pengembangan bank itu sendiri. Suku bunga pinjaman KUR ditetapkan secara flat rate system. Penentuan suku bunga KUR untuk setiap plafond kredit berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 19.**  
**Suku Bunga Riil KUR Untuk Setiap Plafond Kredit**

Plafond	Suku bunga (Flat/Bulan)		Keterangan
	PBTW	Non PBTW	
s.d. Rp. 20 jutaan	1,6%	1,025%	Opsional
> Rp. 20 Juta s.d 50 Juta	1,6%	1,2%	Opsional
> Rp. 50 Juta s.d 100 Juta	--	1,2%	Tetap

Sumber data: Bank Papua 2017

Respon nasabah KUR Bank Papua tahun 2017 terhadap besarnya tingkat bunga yang ditetapkan pihak bank dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 20.**  
**Respon Debitur KUR Bank Papua Tahun 2017**  
**Terhadap Besarnya Tingkat Bunga Penyaluran KUR**

Kategori Penilaian	Skor Nilai	Penilaian Debitur	
		Frekwensi	Persentase
Ringan	3	55	64,71
Sedang	2	30	35,29
Berat	1	0	0
<b>Total</b>		<b>85</b>	<b>100</b>

Sumber data : diolah 2017

Berdasarkan tabel diatas, dari 85 orang responden sebanyak 55 responden (64,71%) menyatakan bahwa tingkat bunga yang ditetapkan pihak bank untuk kredit adalah ringan yang berarti tidak memberatkan responden dan diberikan pemahaman secara jelas oleh pihak bank mengenai kegunaannya. Sedangkan responden yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga KUR sedang sebanyak 35,29% (30 debitur). Hal ini disebabkan karena responden mengharapkan tingkat bunga yang lebih kecil lagi, akan tetapi walaupun responden menyatakan bahwa tingkat bunga sedang, itu Bank Papua. Karena sebagian besar responden menyatakan bahwa tingkat bunga ringan, maka penyaluran KUR berdasarkan tingkat bunga dinilai baik.

### Agunan

Agunan atau jaminan adalah bentuk pembayaran terakhir yang diharapkan oleh bank apabila pengembalian kredit bermasalah atau kredit macet. Nilai agunan adalah sebesar di atas nilai kredit yang diajukan oleh nasabah. Pemberian kredit harus didasarkan pada keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan membayar calon nasabah, modal, prospek usaha debitur, dan agunan. Agunan yang dimiliki calon nasabah sebelumnya diperiksa oleh petugas bank bahkan didokumentasikan ke dalam berkas pinjaman nasabah. Hal ini untuk membuktikan bahwa calon nasabah tersebut memiliki agunan yang dapat dijadikan jaminan untuk mengajukan pinjaman kredit dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan pinjaman kredit. Besarnya agunan juga turut mempengaruhi besarnya pinjaman kredit yang disetujui oleh pihak bank. Calon nasabah juga diberi penjelasan bahwa pada saat permohonan kredit telah disetujui, maka agunan calon nasabah adalah objek jaminannya. Meskipun secara fisik masih berada di bawah kekuasaan nasabah, tetapi hak kepemilikan telah berada di bawah kekuasaan pihak bank selama nasabah yang bersangkutan masih terus melakukan pinjaman kredit di bank. Respon nasabah KUR Bank Papua tahun 2017 terhadap besarnya agunan yang ditetapkan pihak bank dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 21.**  
**Respon Debitur KUR Bank Papua Tahun 2017 Terhadap**  
**Agunan Dalam Penyaluran KUR**

Kategori Penilaian	Skor Nilai	Penilaian Debitur	
		Frekwensi	Persentase
Tidak memberatkan peminjam	3	52	61,18
Peminjam kesulitan untuk memenuhi jaminan yang ditentukan	2	23	27,06
Memberatkan kepada peminjam dan sulit dipenuhi	1	10	11,76
<b>Total</b>		<b>85</b>	<b>100</b>

Sumber data: diolah 2017

Sebanyak 61,18% atau 52 debitur menyatakan tidak kesulitan memberikan agunan untuk mengajukan kredit, mereka sanggup memenuhi agunan yang dibutuhkan untuk permohonan pinjaman kredit. Sedangkan untuk 27,06% (23 debitur), karena walaupun tidak memiliki sesuatu yang dapat dijadikan agunan namun masih bisa menjaminkan agunan milik saudaranya, tentunya dengan persetujuan pihak yang bersangkutan. Selain itu ada juga debitur yang merasa masih keberatan untuk bertanggungjawab terhadap barang jaminan agar tidak diperjual belikan. Dan hanya 11,76% debitur yang menyatakan bahwa kesulitan untuk memenuhi agunan karena debitur tidak memiliki barang yang dapat dijadikan jaminan pada awal mereka mengajukan pinjaman kredit. Dengan begitu, penyaluran KUR dapat dikatakan baik karena sebagian besar responden tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi jaminan dan juga tidak memberatkan untuk dipenuhi.

**Pelayanan Petugas**

Pelayanan petugas merupakan pelayanan yang diberikan bank kepada calon nasabah mulai dari proses permohonan hingga pengembalian kredit. Pelayanan dan pembinaan KUR adalah upaya berkesinambungan yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah yang menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan bank yang dilakukan secara administratif maupun di lapangan. Pembinaan berfungsi untuk mengantisipasi timbulnya resiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit. Pelayanan atau pembinaan petugas ditujukan kepada nasabah perorangan termasuk bimbingan dan pengarahan untuk pengembangan usahanya dan membantu mencari jalan keluar apabila debitur mengalami kesulitan.

Pelayanan yang dinilai meliputi kinerja petugas bank itu sendiri seperti keramahan petugas, kemampuan petugas menjelaskan prosedur pinjaman kUR, kesigapan dan ketelitian petugas serta panjangnya jam pelayanan kantor. Mengingat KUR ini diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah maka perlu adanya pendampingan yang diberikan petugas baik dari awal pengajuan pinjaman hingga pendampingan usaha. Pelayanan petugas ini selain dinilai dari pihak nasabah, pihak bank juga melakukan penilaian kinerja karyawannya. Respon terhadap pelayanan petugas dari pihak responden dalam hal ini nasabah KUR dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 22.**  
**Respon Debitur KUR Bank Papua Tahun 2017 Terhadap**  
**Pelayanan Petugas Dalam Penyaluran KUR**

Kategori Penilaian	Skor Nilai	Penilaian Debitur	
		Frekwensi	Persentase
Jam pelayanan panjang, petugas bank memberi penjelasan cara mengisi, dan memberi pendampingan usaha kepada peminjam	3	73	85,88
Jam pelayanan panjang, petugas bank memberi penjelasan cara mengisi, dan tidak memberi pendampingan usaha kepada peminjam	2	12	11,12
Jam pelayanan pendek, petugas bank memberi penjelasan cara mengisi, dan tidak memberi pendampingan usaha kepada peminjam	1	0	0
<b>Total</b>		<b>85</b>	<b>100</b>

Sumber data: diolah 2017

Berdasarkan tabel diatas 85,88% (73 debitur) menyatakan bahwa kekeluargaan yang begitu erat ketika bersinggungan dengan petugas bank. 12 responden (11,12%) menyatakan cukup baik karena jumlah petugas administrasi pinjaman tidak seimbang dengan jumlah nasabah.

### Analisis Pendapatan Nasabah Sebelum dan Sesudah Menerima KUR

#### Pendapatan Nasabah UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima KUR

Perubahan pada tingkat pendapatan usaha nasabah merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai pihak bank karena selain dapat mengembangkan usaha nasabah, kesejahteraan nasabah pun akan turut meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pendapatan yang mereka terima setiap bulannya.

Cara dalam mengukur seberapa besar dampak dari penggunaan KUR adalah dengan membandingkan pendapatan usaha sebelum dan sesudah menerima KUR. Pendapatan rata-rata sebelum menerima KUR adalah pendapatan responden pada saat memulai membuka usahanya. Sedangkan untuk pendapatan rata-rata setelah menerima KUR adalah pendapatan usaha responden setahun terakhir pada saat penelitian dilakukan setelah menerima KUR untuk menambah modal usahanya. Ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 23.**

**Perubahan Pendapatan Usaha Nasabah KUR Bank Papua  
 Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2017**

Sektor Usaha	Sebelum Kredit Per Bulan	Setelah Kredit Per Bulan	Perubahan
Jasa	Rp. 107.300.000,-	Rp. 199.150.000,-	Rp. 91.850.000,-
Rata-Rata Jasa	Rp. 2.682.500,-	Rp. 4.978.750,-	Rp. 2.296.250,-
Perdagangan	Rp. 148.500.000,-	Rp. 283.725.000,-	Rp. 135.225.000,-
Rata-Rata Perdagangan	Rp. 3.300.000,-	Rp. 6.305.000,-	Rp. 3.005.000,-

Sumber : data diolah, 2017

Berdasarkan data tabel di atas perbandingan perubahan pendapatan usaha nasabah sebelum dan sesudah penyaluran kredit sektor usaha jasa lebih kecil bila dibandingkan dengan sektor usaha perdagangan disebabkan sebagai berikut :

- 1) Sektor usaha jasa
  - a) Melakukan usaha tidak selalu setiap hari.
  - b) Konsumen usaha jasa terbatas pada kalangan tertentu.
  - c) Output usaha jasa tidak beragam hanya bidang transportasi.
  - d) Usaha jasa terdapat ketergantungan pada banyaknya proyek pemerintah untuk jasa angkutan truk dan konsumen jasa angkutan rental terbatas.
- 2) Sektor usaha perdagangan
  - a) Melakukan kegiatan usaha perdagangan setiap hari.
  - b) Dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
  - c) Output usaha perdagangan lebih beragam dan lengkap.
  - d) Usaha perdagangan sembako dan pakaian yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

#### Analisis Pendapatan Nasabah Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Sektor Usaha Jasa

Analisis perbedaan pendapatan nasabah KUR sektor usaha jasa dilakukan dengan uji t-test beda rata-rata sampel berpasangan dengan taraf signifikan ( $\alpha$ ) ditetapkan sebesar 5% (taraf kepercayaan 95%). Adapun data pendapatan nasabah KUR sektor usaha jasa sebelum dan sesudah mendapatkan fasilitas KUR di Bank Papua dianalisis dengan menggunakan SPSS sesuai tabel berikut.

**Tabel 24.**

**Perubahan Pendapatan Rata-Rata Usaha Nasabah KUR Bank Papua  
 Debitur Sektor Usaha Jasa Perbulan Tahun 2017**

No	Nama Nasabah	Pendapatan sebelum KUR	Pendapatan setelah KUR	Perubahan Pendapatan
1	Tony Chandra	3,500,000.00	5,200,000.00	1,700,000.00
2	Tanidar	4,500,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00

No	Nama Nasabah	Pendapatan sebelum KUR	Pendapatan setelah KUR	Perubahan Pendapatan
3	Suryono	2,850,000.00	3,800,000.00	950,000.00
4	Suryani	1,250,000.00	2,750,000.00	1,500,000.00
5	Sulistiawati	1,250,000.00	4,550,000.00	3,300,000.00
6	Sudirman	1,400,000.00	3,000,000.00	1,600,000.00
7	Siti Royono	1,500,000.00	3,500,000.00	2,000,000.00
8	Saeful	2,100,000.00	3,500,000.00	1,400,000.00
9	Rukmana	3,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00
10	Ridwan	4,150,000.00	8,800,000.00	4,650,000.00
11	Nurma	3,500,000.00	5,300,000.00	1,800,000.00
12	Mustari	2,750,000.00	5,500,000.00	2,750,000.00
13	Mulyono	2,500,000.00	4,200,000.00	1,700,000.00
14	Muh. Sidiq	4,750,000.00	7,200,000.00	2,450,000.00
15	Matias	2,000,000.00	3,100,000.00	1,100,000.00
16	Kasman	2,600,000.00	4,200,000.00	1,600,000.00
17	Joko S	1,750,000.00	4,100,000.00	2,350,000.00
18	Jayadi	2,000,000.00	4,500,000.00	2,500,000.00
19	Husnul H	2,500,000.00	4,750,000.00	2,250,000.00
20	Hasim	1,900,000.00	3,200,000.00	1,300,000.00
21	Haril Anwar	2,600,000.00	4,250,000.00	1,650,000.00
22	Halimah	2,500,000.00	4,100,000.00	1,600,000.00
23	Fahry Samsula	3,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00
24	Eli Mamea	2,250,000.00	3,750,000.00	1,500,000.00
25	Edy Lie	2,500,000.00	5,250,000.00	2,750,000.00
26	Dony Irawan	4,000,000.00	8,600,000.00	4,600,000.00
27	Dirjo	1,500,000.00	7,250,000.00	5,750,000.00
28	Dino	2.350.000,00	5.200.000,00	2.850.000,00
29	Burhanudin	3,100,000.00	5,250,000.00	2,150,000.00
30	Burhan	1,500,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00
31	Budiono	1,050,000.00	7,750,000.00	6,700,000.00
32	Bayu Dedi	1,800,000.00	4,750,000.00	2,950,000.00
33	Arifin	4,600,000.00	7,400,000.00	2,800,000.00
34	Arham	2,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00
35	Anwar Usman	2,250,000.00	3,500,000.00	1,250,000.00
36	Andin	3,750,000.00	7,050,000.00	3,300,000.00
37	Andi Nasrin	3,500,000.00	6,250,000.00	2,750,000.00
38	Alghalib	3,800,000.00	6,100,000.00	2,300,000.00
39	Ahmad Fauzi	2,250,000.00	4,200,000.00	1,950,000.00
40	Abdul Thalib	5,250,000.00	7,250,000.00	2,000,000.00
$\Sigma$	<b>Jumlah</b>	<b>107,300,000.00</b>	<b>202,550,000.00</b>	<b>95,250,000.00</b>
$\times$	<b>Rata-rata</b>	<b>2,682,500.00</b>	<b>5,063,750.00</b>	<b>2,381,250.00</b>

Sumber : data diolah 2017

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dianalisis perbedaan pendapatan nasabah KUR sebelum dan sesudah menerima KUR sektor jasa di Bank Papua dengan menggunakan SPSS. Adapun hasilnya sebagai berikut :

**Mean Rata-rata pendapatan**

Adapun uji mean untuk mengetahui rata-rata pendapatan nasabah sebelum dan sesudah menerima kUR Bank Papua yang hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 25**  
**Hasil Uji Mean Sektor Usaha Jasa**  
**Paired Samples Statistica**

	Mean	N	Std Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Sebelum Kredit	2682500	40	1062323,89189	167968,15556
Sesudah Kredit	4978750	40	2621139,10205	414438,48133

Tabel di atas menunjukkan rata-rata pendapatan nasabah sebelum dan sesudah menerima KUR sektor usaha jasa. Sebelum KUR rata-rata pendapatan Rp. 2.682.500,- dan sesudah KUR rata-rata pendapatan Rp. 4.978.750,-. Selisih perubahan pendapatan Rp. 2.296.250,-

**Uji Standart Deviasi (Simpangan Baku)**

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat simpangan baku pendapatan nasabah KUR sektor usaha jasa Bank Papua hasil uji standar deviasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 26.**  
**Hasil Uji Standar Deviasi Sektor Usaha**  
**Paired Samples Statistica**

	Mean	N	Std.Deviation	Std.Error Mean
Pair 1 Sebelum Kredit	2682500,-	40	1062323,89198	167968,15556
Sesudah Kredit	4978750,-	40	2621139,10205	414438,48133

Tabel berikut menunjukkan standar deviasi sebelum KUR sektor usaha jasa sebesar Rp. 1.062.323,89 yang berarti penerimaan dari usaha nasabah KUR Bank Papua mempunyai selisih penyimpangan perbedaan satu sama lainnya rata-rata sebesar Rp. 1.062.323,89 per bulan. Adapun standar deviasi sesudah KUR sebesar Rp. 2.621.139,10 berarti penerimaan dari sektor usaha jasa nasabah KUR Bank Papua mempunyai selisih penyimpangan satu sama lainnya sebesar Rp. 2.621.139,10 per bulan.

**Uji Korelasi**

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 2 variabel yang diuji hasil uji korelasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 27.**  
**Hasil Uji Korelasi Sektor Usaha Jasa**  
**Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig
Pair 1 Sebelum Kredit & Sesudah Kredit	40	0,414	0,008

Tabel di atas menunjukkan bahwa korelasi antara 2 variabel adalah sebesar 0,414 dengan nilai probabilitas (0,008) lebih besar daripada nilai  $\alpha = 5\%$ . Hal ini berarti korelasi antara pendapatan nasabah KUR sebelum dan sesudah menerima KUR tidak erat dan tidak berhubungan secara nyata, kesimpulannya tidak ada hubungan positif dan nilai koefisiensi korelasi antara sebelum dan sesudah menerima KUR hanya sebesar 0,414.

**Uji t-hitung**

Uji t-hitung dilakukan untuk menganalisa ada tidaknya perbedaan pendapatan dari 2 variabel yang diuji. Hasil analisis uji t-hitung dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 28.**  
**Hasil Uji t-hitung Sektor Usaha Jasa**  
**Paired Samples Test**

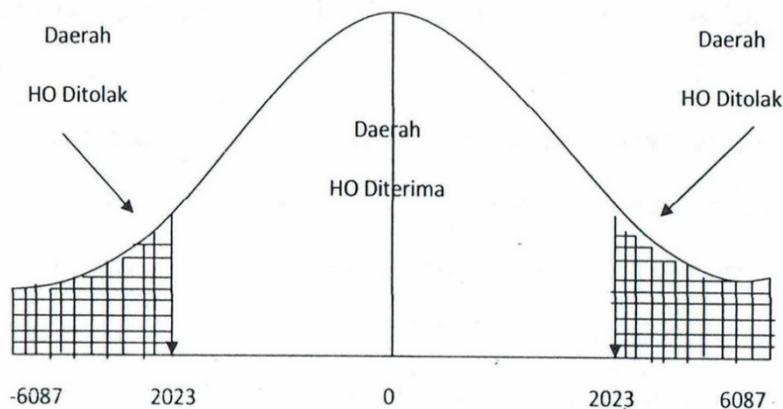
	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed).
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair1 Sebelum Kredit – Setelah Kredit	-2296250,0000	2385785,56379	377225,81952	-3059261,2399	-1533238,7601	-6,087	39	2,023

Berdasarkan tabel berikut dapat dianalisis mengenai perbedaan pendapatan nasabah sebelum dan sesudah menerima kredit. Ada 2 cara untuk pengambilan KUR yaitu dengan cara perbandingan t-hitung dengan t-tabel, cara lain adalah berdasarkan nilai probabilitas (Santoso 1999, 161 dan Sholeh 2005, 157).

**Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel.**

Uji ini dilakukan pada dua sisi karena akan diketahui apakah rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah menerima KUR sama atau tidak sama. Jadi bisa lebih besar atau lebih kecil, karenanya dipakai uji dua sisi. Hasil analisis diatas menunjukkan nilai t hitung adalah sebesar -6,087, adapun nilai t tabel bila  $df = 39$  dan  $\alpha = 5\%$  adalah sebesar 2,023. Untuk mempermudah mengetahui  $H_0$  diterima atau ditolak dapat dilakukan dengan melihat gambar di bawah ini.

**Gambar 1.**  
**Uji Dua Pihak Sektor Jasa**



Gambar diatas menunjukkan bahwa t hitung (-6,087) terletak pada daerah  $H_0$  ditolak, maka bisa disimpulkan bahwa pendapatan nasabah KUR Bank Papua sebelum dan sesudah menerima KUR berbeda. Dalam pengujian dua pihak berlaku ketentuan, dimana tanda -(minus) diabaikan (Hartono 2008, 152).

**Berdasarkan nilai probabilitas**

Pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada nilai probabilitas (Santoso 2012, 162 dan Priyatno 2009, 86) dilakukan dengan persyaratan:

- Jika probabilitas  $> \alpha$  (0,05), maka  $H_0$  diterima
- Jika probabilitas  $< \alpha$  (0,05), maka  $H_0$  ditolak

Berdasarkan hasil analisis uji t-test beda rata-rata sampel berpasangan dimana nilai probabilitas  $(0,000) < (0,05)$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, maka bisa disimpulkan bahwa pendapatan nasabah KUR sektor usaha jasa di Bank Papua sebelum dan sesudah menerima fasilitas kredit tidak sama (berbeda).

Data pada tabel juga menunjukkan terdapat perbedaan mean sebesar Rp. 2.296.250,-. Angka ini berasal dari pendapatan nasabah sebelum dan sesudah menerima fasilitas KUR di Bank Papua yaitu sebesar Rp. 2.682.500 - Rp. 4.978.750 = Rp. 2.296.250 perbulan. Hal ini berarti rata-rata pendapatan nasabah sebelum dan sesudah menerima KUR sektor usaha jasa di Bank Papua tidak sama (berbeda) yaitu sebesar Rp. 2.296.250.

Berdasarkan hasil uji t-test beda rata-rata sampel berpasangan diatas, maka masalah yang kedua dalam penelitian ini tentang implementasi KUR terhadap pendapatan nasabah UMKM sebelum dan sesudah menerima kredit sektor usaha jasa Bank Papua adalah sesuai dengan hipotesis yaitu implementasi kredit dapat meningkatkan pendapatan nasabah. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini terbukti.

**Analisis Pendapatan Nasabah Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit sektor usaha perdagangan**

Analisis perbedaan pendapatan nasabah KUR sektor usaha perdagangan dilakukan dengan uji t-test beda rata-rata sampel berpasangan dengan taraf signifikan ( $\alpha$ ) ditetapkan sebesar 5% (taraf kepercayaan 95%). Adapun data pendapatan nasabah KUR sektor usaha perdagangan sebelum dan sesudah mendapatkan fasilitas KUR di Bank Papua dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 29.**  
**Perubahan Pendapatan Rata-Rata Usaha Nasabah KUR Bank Papua Responden**  
**Sektor Usaha Perdagangan Perbulan Tahun 2017**

No	Nama Nasabah	Pendapatan Sebelum KUR	Pendapatan Setelah KUR	Perubahan Pendapatan
1	Abdul Rahman	1,250,000.00	3,150,000.00	1,900,000.00
2	Agus	3,350,000.00	6,900,000.00	3,550,000.00
3	Alfred. K	2,600,000.00	6,100,000.00	3,500,000.00
4	Alfrisa Sampe	2,500,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00
5	Andi Pasamba	3,000,000.00	6,250,000.00	3,250,000.00
6	Arief Heru	2,900,000.00	7,800,000.00	4,900,000.00
7	Arifin Hasan	1,100,000.00	4,000,000.00	2,900,000.00
8	Baktiar	2,500,000.00	4,000,000.00	1,500,000.00
9	Barnabas	2,500,000.00	4,500,000.00	2,000,000.00
10	D. Zaenudin	5,300,000.00	7,250,000.00	1,950,000.00
11	Dahlia	4,200,000.00	6,800,000.00	2,600,000.00
12	Dahmar	1,500,000.00	5,150,000.00	3,650,000.00
13	Dasril	2,000,000.00	4,500,000.00	2,500,000.00
14	Domoris. S	8,250,000.00	10,275,000.00	2,025,000.00
15	Edi Jubaidi	3,400,000.00	8,100,000.00	4,700,000.00
16	Edi Semdoyo	2,250,000.00	6,200,000.00	3,950,000.00
17	Edi Tobing	2,000,000.00	3,450,000.00	1,450,000.00
18	Eryanto Budi	6,200,000.00	11,600,000.00	5,400,000.00

No	Nama Nasabah	Pendapatan Sebelum KUR	Pendapatan Setelah KUR	Perubahan Pendapatan
19	H. Abdul Saiful	4,500,000.00	6,050,000.00	1,550,000.00
20	H. Anwar	3,000,000.00	6,700,000.00	3,700,000.00
21	H. Muslimin	4,200,000.00	6,300,000.00	2,100,000.00
22	Hj. Aminah	2,800,000.00	6,600,000.00	3,800,000.00
23	Hj. Rosidiana	3,250,000.00	8,400,000.00	5,150,000.00
24	Hj. Siti Rabiah	3,500,000.00	5,700,000.00	2,200,000.00
25	Jony Ginting	2,000,000.00	5,400,000.00	3,400,000.00
26	Kondradus. T	3,200,000.00	5,450,000.00	2,250,000.00
27	Litung Kampu	5,300,000.00	7,700,000.00	2,400,000.00
28	M. Ramli	5,000,000.00	9,000,000.00	4,000,000.00
29	Mahfud	1,800,000.00	5,150,000.00	3,350,000.00
30	Moltor	2,000,000.00	5,500,000.00	3,500,000.00
31	Muh. Arief	5,600,000.00	7,450,000.00	1,850,000.00
32	Mulyadi	2,250,000.00	5,000,000.00	2,750,000.00
33	Nofa Ismail	3,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00
34	Nursiah	3,500,000.00	5,100,000.00	1,600,000.00
35	Nurul Husna	1,500,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00
36	Pramudya	2,800,000.00	5,000,000.00	2,200,000.00
37	Riski	1,000,000.00	3,850,000.00	2,850,000.00
38	Rosina	1,200,000.00	5,650,000.00	4,450,000.00
39	Rosyida	10,000,000.00	13,500,000.00	3,500,000.00
40	Sriwahyuni	2,700,000.00	7,000,000.00	4,300,000.00
41	Sukini	3,100,000.00	5,350,000.00	2,250,000.00
42	Sumarno	3,700,000.00	8,900,000.00	5,200,000.00
43	Usman	1,500,000.00	5,300,000.00	3,800,000.00
44	Wiyong	3,800,000.00	5,850,000.00	2,050,000.00
45	Yohanes. P	5,500,000.00	7,800,000.00	2,300,000.00
Σ	Jumlah	148,500,000.00	283,725,000.00	135,225,000.00
×	Rata Rata	3,300,000.00	6,305,000.00	3,005,000.00

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dianalisis perbedaan pendapatan nasabah KUR sebelum dan sesudah menerima kredit sektor usaha perdagangan di Bank Papua dengan menggunakan SPSS. Adapun hasilnya sebagai berikut :

**Mean rata-rata pendapatan**

Adapun uji mean untuk mengetahui rata-rata pendapatan nasabah sebelum dan sesudah menerima KUR Bank Papua yang hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 30**  
**Hasil Uji Mean Sektor Usaha Perdagangan**  
**Paired Samples Statistic**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
<b>Pair 1</b>				
<b>Sebelum KUR</b>	<b>3300000,0000</b>	<b>45</b>	<b>1820433,26511</b>	<b>271374,16862</b>
<b>Setelah KUR</b>	<b>6305000,0000</b>	<b>45</b>	<b>2199338,74360</b>	<b>327858,06242</b>

Tabel di atas menunjukkan rata-rata pendapatan nasabah sebelum dan sesudah menerima KUR sektor usaha perdagangan. Sebelum menerima KUR rata-rata pendapatan sebesar Rp. 3.300.000,- dan sesudah menerima KUR rata-rata pendapatan Rp. 6.305.000,-. Selisih perubahan pendapatan Rp. 3.005.000,-

**Uji Standar Deviasi (Simpangan Baku)**

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat simpangan baku pendapatan nasabah KUR sektor usaha perdagangan Bank Papua. Hasil uji standar deviasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 31.**  
**Hasil Uji Standar Deviasi Sektor Usaha Perdagangan**  
**Paired Samples Statistica**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Sebelum KUR	3300000,0000	45	1820433,26511	271374,16862
Sesudah KUR	6305000,0000	45	2199338,74360	327858,06242

Tabel di atas menunjukkan standar deviasi sebelum KUR sektor usaha perdagangan sebesar Rp. 1.820.433,26 yang berarti penerimaan dari usaha nasabah KUR di Bank Papua mempunyai selisih penyimpangan perbedaan satu sama lainnya rata-rata sebesar Rp. 1.820.433,26 perbulan. Adapun standar deviasi sesudah KUR sebesar Rp. 2.199.338,74, berarti penerimaan dari sektor usaha perdagangan nasabah KUR Bank Papua mempunyai selisih penyimpangan satu sama lainnya sebesar Rp. 2.199.338,74 perbulan.

**Uji Korelasi**

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 2 variabel yang diuji. Hasil uji korelasi dapat dilihat pada tabel 5.28

**Tabel 32**  
**Hasil Uji Korelasi Sektor Usaha Perdagangan**  
**Paired Samples Correlation**

	N	Correlation	Sig
<b>Pair 1</b> <b>Sebelum KUR &amp;</b> <b>Sesudah KUR</b>	<b>45</b>	<b>0,542</b>	<b>0,000</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa korelasi antara 2 variabel adalah sebesar 0,542 dengan nilai probabilitas (0,000) lebih besar daripada nilai  $\alpha = 5\%$ . Hal ini berarti korelasi antara pendapatan nasabah KUR sebelum dan sesudah menerima KUR tidak erat dan tidak berhubungan secara nyata. Kesimpulannya tidak ada hubungan positif dan nilai koefisiensi korelasi antara sebelum dan sesudah menerima KUR hanya sebesar 0,542.

**Uji t-hitung**

Uji t-hitung dilakukan untuk menganalisa ada tidaknya perbedaan pendapatan dari 2 variabel yang diuji. Hasil analisis uji t-hitung dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 33.**  
**Hasil Uji t-hitung Sektor Usaha Perdagangan**  
**Paired Samples Test**

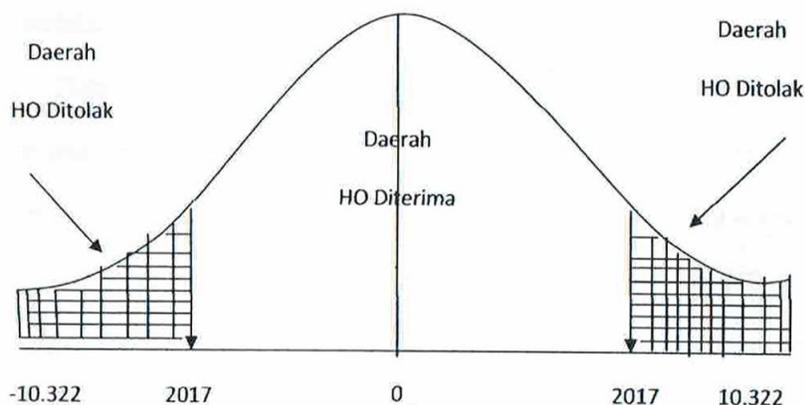
	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum Kredit – Sesudah Kredit	-3005000,00	1953025,04290	291139,78385	-3591753,6800	-2418246,3200	-10,322	44	0,000

Berdasarkan di atas dapat dianalisis mengenai perbedaan pendapatan nasabah sebelum dan sesudah menerima kredit. Ada 2 cara untuk pengambilan kredit yaitu dengan cara perbandingan t-hitung dengan t-tabel, cara lain adalah berdasarkan nilai probabilitas (Santoso 1999: 161 dan Sholeh 2005: 157).

**Berdasarkan perbandingan t-hitung dengan t-tabel**

Uji ini dilakukan pada dua sisi karena akan diketahui apakah rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah menerima kredit sama atau tidak sama. Jadi bisa lebih besar atau lebih kecil, karenanya dipakai uji dua sisi. Hasil analisis diatas menunjukkan nilai t-hitung adalah sebesar -10,322, adapun nilai t tabel bila  $df = 44$  dan  $\alpha = 5\%$  (0,05) adalah sebesar 2,017. Untuk mempermudah mengetahui  $H_0$  diterima atau ditolak dapat dilakukan dengan melihat gambar di bawah ini.

**Gambar 2.**  
**Ujia Dua Pihak Sektor Usaha Perdagangan**



Gambar diatas menunjukkan bahwa t hitung (-10,322) terletak pada daerah  $H_0$  ditolak, maka bisa disimpulkan bahwa pendapatan nasabah KUR Bank Papua sebelum dan sesudah menerima KUR berbeda. Dalam pengujian dua pihak berlaku ketentuan, dimana tanda - (minus) diabaikan (Hartono 2008: 152).

**Berdasarkan nilai probabilitas**

Pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada nilai probabilitas (Santoso 2012: 162 dan Priyatno 2009: 86) dilakukan dengan persyaratan:

- Jika probabilitas  $> \alpha$  (0,05), maka  $H_0$  diterima
- Jika probabilitas  $< \alpha$  (0,05), maka  $H_0$  ditolak

Berdasarkan hasil analisis uji t-test beda rata-rata sampel berpasangan, dimana nilai probabilitas (0,000)  $<$  (0,05), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, maka bisa disimpulkan bahwa pendapatan nasabah KUR sektor usaha perdagangan di Bank Papua sebelum dan sesudah menerima fasilitas kredit tidak sama (berbeda).

Data pada tabel juga menunjukkan terdapat perbedaan mean sebesar Rp. 3.005.000. Angka ini berasal dari pendapatan nasabah sebelum dan sesudah menerima fasilitas kredit yaitu sebesar Rp. 3.300.000

– Rp. 6.305.000 = Rp. 3.005.000 perbulan. Hal ini berarti rata-rata pendapatan nasabah sebelum dan sesudah menerima kredit tidak sama (berbeda) sebesar Rp. 3.005.000,-

Berdasarkan hasil uji t-test beda rata-rata sampel berpasangan diatas, maka masalah yang kedua dalam penelitian ini tentang implementasi kredit terhadap pendapatan nasabah UMKM sebelum dan sesudah menerima kredit sektor usaha perdagangan adalah sesuai dengan hipotesis yaitu implementasi KUR Bank Papua dapat meningkatkan pendapatan nasabah KUR Bank Papua. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini terbukti.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Berdasarkan kriteria penilaian efektivitas dari responden terhadap penyaluran KUR dari Bank Papua sudah efektif memperoleh total skor efektivitas sebesar 1585 dari total maksimum skor 1785 berarti tujuan Bank Papua dalam menyalurkan KUR guna mengembangkan usaha nasabah sudah tercapai sesuai dengan harapan nasabah UMKM dan pendapatan bunga bagi Bank Papua sektor usaha perdagangan lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan sektor usaha jasa.
2. Implementasi KUR Bank Papua dapat meningkatkan pendapatan nasabah UMKM sektor usaha perdagangan sebelum dan sesudah menerima KUR Bank Papua dari 45 responden total pendapatan sebelum KUR Rp. 148.500.000,- rata-rata Rp. 3.300.000,- perubahan setelah menerima KUR total pendapatan Rp. 283.725.000,- rata-rata Rp. 6.305.000,- meningkat pendapatan nasabah sebesar 191,06%. Implementasi KUR Bank Papua dapat meningkatkan pendapatan nasabah UMKM sektor usaha jasa sebelum dan sesudah menerima KUR Bank Papua dari 40 responden total pendapatan sebelum KUR sebesar Rp. 107.300.000,- rata-rata pendapatan Rp. 2.696.250,- setelah KUR pendapatan Rp. 4.978.750,- perubahan peningkatan pendapatan nasabah 185,58%.

### Saran

1. Management Bank Papua perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi KUR dalam rangka meningkatkan LDR dan sekaligus merubah perekonomian masyarakat melalui dukungan terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Management Bank Papua lebih giat lagi dalam memasarkan KUR melalui pendekatan kepada nasabah UMKM khususnya dalam rangka mendapatkan nasabah baru.
3. Perlu dilakukannya perbaikan prosedur, persyaratan dan agunan / jaminan KUR yang lebih memperhatikan kebutuhan serta kemampuan calon nasabah UMKM dengan tetap mempertahankan penerapan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Laksmi, (2008). Analisis Kinerja Kredit Umum Pedesaan dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Kecil;
- Farid Wijaya dan Soesatwo Hadiwigeno, (1991). Bank dan Lembaga Keuangan di Indonesia. Erlangga: Jakarta;
- Gatot Supramono, (2009). Perbankan Dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis, PT. Rineka Cipta, Jakarta;
- H. Salim, (2007). Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Kasmir, (2008), Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Lukman Dendawijaya, (2000). Manajemen Perbankan, Jakarta: Ghalia Indonesia Hasibuan, Malayu, S.P, 2008, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta;

- M. Bahsan. (2007), *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- M.D Badruzaman, (1991), *Perkreditan Kredit Bank*, Citra Aditya Abadi, Medan;
- Samuelson. (1986), *The E Hasibuan*, Malayu, S.P, (2008), *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta;
- Sembor, Amilien; Riani, I. A. P; Urip S, Transna P; Aminah, Siti. (2017). *Dampak Program Bantuan Keuangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kepada Masyarakat Di Kabupaten Lanny Jaya*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume IV No. 1, April 2017;
- Soeratno dan Arsyad Lincoln, (2008). *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta;
- Sumbang, Delvie; Umar, Hasan B; Patinggi, P. N; Klara, Antonia. (2017). *Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pada Masyarakat Kampung Napua Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume IV No. 3, Desember 2017;
- Susatyo Reksodiprodjo. (1986). *Prinsip Dasar Operasi Bank*. BPFE-Yogyakarta;
- Sutan Remy Sjahdeini , (2002), *Hukum Kepailitan; Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-undang No.4 Tahun (1998)*, Grafiti, Jakarta;
- T.P. Muljono. (2001). *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*. BPFE-Yogyakarta;
- Taswan, (2010), *Manajemen Perbankan : Konsep, Teknik & Aplikasi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Tri Widiyono, (2006), *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor;
- Umar Husein, (2011), *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada PT, Jakarta;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun (2008) tentang *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*;
- Widjanarto, (1993). *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Pustaka Utama Graffiti: Jakarta.